



# Menuju Pengawasan Berbasis Digital



# kata awal

Puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izinNya Majalah Cahaya Pengawasan Tahun 2023 dapat terbit dan dinikmati oleh SahabatItjenKumham

Tahun 2023 adalah tahun yang penuh warna bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, sepanjang tahun ini, Itjen Kemenkumham terus berupaya untuk bebenah diri dengan bertransformasi dari watchdog menjadi konsultan sekaligus katalisator yang membantu memecahkan masalah secara proaktif terhadap berbagai masalah yang dihadapi satuan kerja.

Itjen Kemenkumham sebagai instansi yang berfokus kepada pengawasan internal selalu berkomitmen untuk terus maju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Itjen Kemenkumham selalu menanamkan nilai Profesional dan Integritas, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pegawai, dari tataran terendah sampai kepada tataran tertinggi, sehingga seluruh pegawai dapat menjadi unsur yang dapat mendorong kemajuan organisasi.

Dalam membangun dan menjaga marwah Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku aparat pengawas intern, selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai integritas, yang dimulai dari calon pegawai sampai kepada pimpinan tertingginya sekalipun, untuk membangun manajemen pengawasan yang bercirikan pada good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Sudah menjadi keharusan (mandatory) bagi Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pembenahan melalui implementasi program dan kegiatan reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan pengawasan dan mendorong keberhasilan organisasi.

Dalam edisi Cahaya Pengawasan kali ini, kami ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, dalam rangka mengawal tugas dan fungsi pengawasan, termasuk artikel-artikel lainnya yang tersusun dalam lembaran lembaran yang disajikan.

Besar harapan kami, agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna meningkatkan profesionalisme dan inovasi dalam pembuatan majalah Cahaya Pengawasan ini.

Kami juga membuka peluang luas untuk SahabatItjenKumham dapat berkontribusi dalam mengisi majalah yang akan diterbitkan periode selanjutnya.

## Tim Redaksi

**Penasehat:** Inspektur Jenderal **Pengarah:** Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I s/d VI  
**Penanggung Jawab:** Slamet Iman Santoso **Pimpinan Redaksi:** Brahmantya Puji  
**Tim Redaksi:** Ratna Ningsih, Inas Maisa, Muhammad Fadlika Donie Paron, Eko Budi Sujarwanto  
**Redaktur Foto:** Tim Humas Inspektorat Jenderal **Desain Grafis dan Layout:** Muhammad Fadlika Donie Paron  
**Diterbitkan oleh:** Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  
**Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan



# daftar ISI

**4 - 25** *pengawasan  
berbasis  
digital*

**26-41**

*program  
unggulan  
2023*

**42-55**

*langkah  
inspektorat jenderal  
kemenkumham*

**56-69** *sosok  
inspirasi*

**70-71** *program unggulan 2024*



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

## Transformasi Pengawasan Berbasis Digital dimata Inspektur Jenderal, Razilu

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi sangatlah pesat, Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk selalu memberikan peningkatan dan inovasi pada setiap tingkat layanan yang diberikan. Tentunya hal ini tidak menutup kesempatan dan peluang bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan Transformasi Pengawasan Berbasis Digital. Bagaimana Bapak melihat peluang kemajuan teknologi di bidang pengawasan?

Peluang kemajuan teknologi di bidang pengawasan, khususnya melalui transformasi berbasis digital, dapat membawa sejumlah manfaat signifikan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dan pemerintah Indonesia pada umumnya. Berikut adalah beberapa dampak positif dari terimplementasinya digitalisasi audit : Efisiensi operasional, akurasi dan kualitas informasi yang meningkat, analisis data yang lebih mendalam, akuntabilitas data, pencegahan korupsi dan keamanan informasi

Itjen Kemenkumham sendiri telah menyelenggarakan pembangunan digitalisasi pengawasan di lingkungan Kemenkumham. Menurut Bapak, kenapa pengawasan digital menjadi penting diselenggarakan di lingkungan Kemenkumham? Sejauh mana urgencitasnya?

Karena sangat berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan yang paling penting adalah keamanan database dalam dokumen-dokumen audit agar terjamin privasi data yang bersifat rahasia. Oleh karena itu digitalisasi pengawasan harus dilaksanakan karena digitalisasi audit dikemudian hari mampu menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan hadirnya aplikasi Simwas, WBS, Sipidu dan yang saat ini telah dilaksanakan softlaunching aplikasi E-Mawas. Menurut Bapak, apakah cukup dapat dikatakan bahwa Itjen Kemenkumham sendiri telah bertransformasi melaksanakan pengawasan berbasis digital?

Itjen kumham pasti melakukan transformasi digital, namun hal itu masih belum cukup untuk menjawab



tantangan pengawasan berbasis digital, kita masih membutuhkan insan-insan Itjen Kumham yang agile dan dapat belajar dengan cepat agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Kemudian saya juga berpesen agar aplikasi emawas dapat menjadi tulang punggung yang mampu membawa itjen ke dalam dunia audit yang berbasis digital.

**Untuk menuju transformasi pengawasan berbasis digital, Apakah dengan membangun infrastruktur saja dirasa cukup? Startegi apa yang bisa Bapak lakukan supaya pengawasan digital berjalan dengan optimal? Apakah ada aspek lain yang dibangun?**

Pembangunan infrastruktur memang diperlukan tapi tidak hanya itu saja namun diperlukan juga SDM berkualitas yang memadai, aplikasi yang mampu untuk menjawab kebutuhan manajemen serta kemudahan untuk dapat mengakses oleh user dan keamanan database Itjen Kumham.

**Bagaimana dengan membangun sumber daya manusia yang diiringi dengan Pembangunan infrastruktur itu sendiri?**

Membangun SDM merupakan salah satu hal yang saya prioritaskan selaku Irjen, oleh karenanya program-program unggulan seperti aktif belajar plus, saya harap mampu menjadi jawaban atas keinginan saya untuk mewujudkan SDM Itjen Kumham yang terampil.

**Berbicara mengenai e-mawas, apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran atau ide Bapak bahwa Itjen harus memiliki aplikasi e-mawas?**

Karena melihat dalam prakteknya terkait dengan proses surat, kemudian hasil pemeriksaan dan petunjuk teknis terkait pemeriksaan tersebut hanya sebatas melalui email, sedangkan data-data tersebut merupakan data yang Confidential jadi sudah sewajarnya kita Itjen memiliki aplikasi yang dapat menampung data-data tersebut dan jelas terjaga kerahasiaannya. Dan kita juga membutuhkan aplikasi yang mampu menampilkan dashboard dari hasil audit untuk kebutuhan Pimpinan dalam mengambil Keputusan.

**E-mawas merupakan “hasil karya murni insan pengayoman”, kolaborasi antara Itjen Kemenkumham dengan Pusdatin. Mengapa saat itu Bapak tidak menunjuk / menggunakan pihak vendor profesional yang membangun aplikasi E-Mawas?**

Baik ada beberapa hal yang menjadi landasan, yang pertama saya merasa insan pengayoman tidak kalah cerdas

dan berbakat dibandingkan vendor-vendor aplikasi diluar sana, Menyusun aplikasi ini tidak mudah karena terdiri dari beberapa modul namun dapat diselesaikan dengan baik dengan Kerjasama yang baik antara Pusdatin dengan Itjen. Kemudian alasan kedua, data didalam emawas saya ingin untuk dapat dikelola mandiri oleh kita tanpa campur tangan pihak ketiga, yang artinya dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data.

**Menurut Bapak, tantangan apa yang dirasakan ketika membangun sebuah Aplikasi dengan menggunakan talenta murni dalam hal ini Insan Pengayoman?**

Saya rasa tidak banyak hanya waktu dan komitmen dari masing-masing pihak yang perlu dijaga agar aplikasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh Itjen, namun diperlukan juga kesepahaman dalam Format-format dokumen dari surat sampai dengan Laporan akhir hasil audit dst.

**Butuh waktu yang tidak singkat dalam pengembangan Aplikasi E-Mawas, apa harapan besar Bapak jika tiba saatnya aplikasi ini telah digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi Itjen Kemenkumham?**

Yang jelas aplikasi ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya, memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi untuk kebutuhan monitoring, dan menjamin keamanan dari data-data yang telah di input kedalam aplikasi emawas agar tidak dapat diakses/ dirubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Seperti yang kita ketahui, bahwa Bapak sangat berpengalaman dalam hal pembangunan sebuah aplikasi, hal ini bisa terlihat bagaimana Bapak telah menghadirkan beberapa aplikasi saat menjabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menurut Bapak apa perbedaan yang Bapak rasakan ketika membangun sebuah transformasi digital pada DJKI dengan Itjen?**

Pada dasarnya dalam membangun aplikasi untuk transformasi digital tidak

banyak berbeda dari DJKI maupun Itjen karena yang diharapkan adalah aplikasi mampu mempermudah penggunanya dalam mengakses maupun memproses suatu informasi dengan baik, sehingga hasil dari data yang di input dapat memberikan informasi yang valid dan berkualitas untuk manajemen mengambil Keputusan penting, dan yang tidak kalah penting adalah keamanan dari aplikasi tersebut, keamanan database untuk melindungi data-data yang confidential

**Kedepan, apakah Bapak akan kembali menghadirkan terobosan/inovasi berbasis digital yang mendukung tugas dan fungsi pengawasan?**

Terobosan / inovasi tentu akan terus diciptakan, dengan tetap mengevaluasi pemanfaatan digital dalam pengawasan yang telah ada selama ini. Perlu diingat ke depan, risiko fraud akan terus bertambah, hambatan dalam pemanfaatan sumber daya, cara bekerja baru dalam pengawasan, perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat sudah pasti membutuhkan inovasi / terobosan, termasuk terobosan digital. Saya juga memiliki keinginan agar para auditor tidak menjadi Jurassic Auditor yang bersifat old fashioned. Sehingga transformasi digital dapat berdampak pada hasil pengawasan yang lebih inovatif, efisien, kolaboratif, inklusif, mengakselerasi pencapaian target, dan meningkatkan akuntabilitas guna dapat memberikan hasil pengawasan yang lebih cepat, akurat, lebih berkualitas dan high level.

**Pertanyaan terakhir, Apa mimpi besar Bapak Irjen kedepan terhadap Inspektoral Jenderal? Khususnya dalam mengelaborasi teknologi digital dengan pelaksanaan tugas pengawasan.**

Harapan saya kedepan dengan adanya teknologi digital, pelaksanaan tugas pengawasan bisa dilakukan darimana saja, menghasilkan informasi berkualitas, dan mampu menganalisa dengan baik dari Laporan yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang terbaik untuk memberikan layanan kepada bangsa dan negara secara umum



# ITJEN GANDENG PUSDATIN LAKUKAN TRANSFORMASI PENGAWASAN BERBASIS DIGITAL



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

Pada tahun 2021, setelah dilantik menjadi Inspektur Jenderal, Razilu mencetuskan Aplikasi E-Mawas sebagai bentuk Transformasi Digital pada Inspektorat Jenderal yang mampu mendukung proses bisnis pemerintahan di era digital. E-Mawas diciptakan karena Inspektorat Jenderal belum memiliki aplikasi yang mewadahi Manajemen Pengawasan. Aplikasi berbasis web ini merupakan aplikasi sistem pengawasan yang berbasis digital yang berfungsi sebagai kertas kerja bagi para auditor.

**J**akarta – Dalam rangka tindak lanjut perbaikan dan pembaharuan aplikasi administratif di Inspektorat Jenderal, Razilu selaku Inspektur Jenderal mengadakan rapat bersama Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM (Pusdatin Kemenkumham) pada Ruang Rapat Inspektur Jenderal hari Jumat (19/03/2021).

Razilu mengusulkan untuk menyederhanakan beberapa aplikasi yang sudah ada seperti e-office, simwas, sipidu dan e-was yang mengharuskan pengguna untuk login di masing-

masing aplikasi, maka dibuatlah satu aplikasi yang menggabungkan aplikasi-aplikasi tersebut. “Kita ingin membangun, satu aplikasi besar yang terdiri dari beberapa modul, aplikasi tersebut kita sebut E-Mawas ; Elektronik Manajemen Pengawas,” ujar Razilu.

“Ini termasuk salah satu komitmen kami dari Panca Komitmen, yaitu meningkatkan kapasitas digital dan melakukan transformasi pengawasan berbasis digital,” jelas Razilu.

Kepala Pusdatin  
Kemenkumham,  
Hermansyah Siregar,

menanggapi diskusi pada rapat ini, “Pusdatin memiliki tugas sebagai fasilitator dan koordinator sistem informasi di Kemenkumham, sesuai dengan apa yang tadi Bapak (Irjen) sampaikan terkait pembuatan aplikasi tentu kami akan mendukung dalam melaksanakan pengawasan berbasis digital,”ujarnya.

Hasil dari rapat hari ini akan dibentuk tim pendamping beranggotakan para Auditor untuk mendampingi tim Pusdatin dan vendor pembuat aplikasi agar aplikasi E- Mawas ini dapat dibuat dan digunakan secara efisien.



# perjalanan E-MAWAS

E-MAWAs merupakan Aplikasi single sign on sistem manajemen pengawasan berbasis digital yang digunakan sebagai kertas kerja auditor, E-MAWAs pertama kali digagas oleh Inspektur Jenderal ke-16 yaitu Bapak Razilu.

Gagasan pembangunan Aplikasi E-MAWAs pertama kali muncul dikarenakan belum adanya sebuah aplikasi yang mewadahi Manajemen Pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi utama dari Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal.

E-MAWAs pertama kali dikembangkan pada tahun 2021 oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal yang secara langsung ditunjuk oleh Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengembangan Aplikasi tersebut.

E-Mawas dibangun dalam 9 Modul, diantaranya :

- Modul Dashboard
- Modul Rencana Penugasan
- Modul Audit
- Modul Audit dengan tujuan Tertentu
- Modul Evaluasi WBK/WBBM
- Modul Pengawasan Lainnya (Reviu, Evaluasi dan Pemantauan)
- Modul Pendampingan
- Modul Hukuman Disiplin
- Modul Layanan Pengaduan

E-MAWAs diluncurkan pertama kali bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Inspektorat Jenderal yang ke-55 tanggal 3 November 2021. Penggunaan aplikasi E-MAWAs pada saat itu belum optimal sepenuhnya dipergunakan, dikarenakan baru 4 modul yang dapat dioperasikan, sehingga konsep sistem manajemen pengawasan dari hulu ke hilir belum menghasilkan output yang diharapkan.



Dalam perjalanannya E-MAWas kemudian dimutakhirkan kembali pada tahun 2022 - 2023, Pengembangan E-MAWas dikembangkan dengan titik fokus pada 5 modul diantaranya : Evaluasi WBK/WBBM, Pengawasan Lainnya (Reviu, Evaluasi dan Pemantauan), Pendampingan, Hukuman Disiplin dan Layanan Pengaduan. Dalam rangka mendukung pembangunan E-MAWas dilakukan 2 kali Konsinyasi Percepatan Pembangunan E-MAWas dengan masing-masing progress capaiannya.

Pada tahun 2023, aplikasi E-Mawas telah mencapai pengembangan 100% dan telah dilaksanakan soft launching dalam rangka memperkenalkan Aplikasi E-MAWas kepada seluruh satuan kerja bahwa Manajemen Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah diwujudkan dalam bentuk Digital.

Pada tahun 2023 juga,  
bertepatan dengan

**Hari Ulang Tahun**

Inspektorat Jenderal **ke-57**,

Inspektorat Jenderal melaksanakan

**Grand Launching**

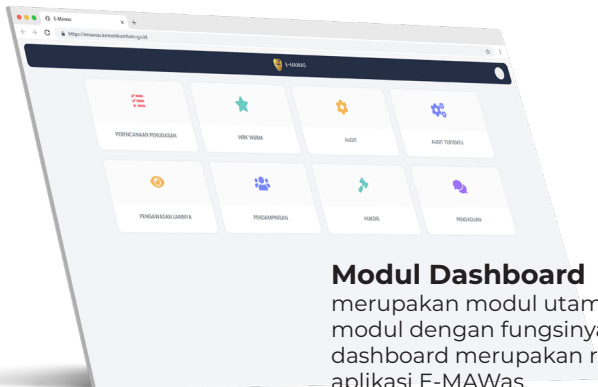
**Aplikasi E-Mawas** yang

**diresmikan** secara langsung oleh

Wakil Menteri Hukum dan HAM,

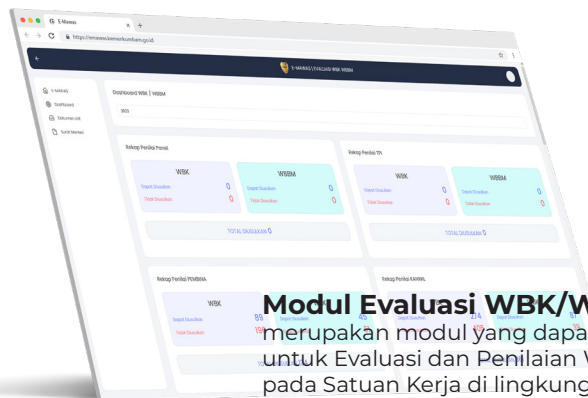
**Edward Omar Sharif Hiariej.**

# mengenalkan modul E-MAWAS



## Modul Dashboard

merupakan modul utama yang berisikan 8 modul dengan fungsinya masing-masing, dashboard merupakan rumah utama dari aplikasi E-MAWAS.



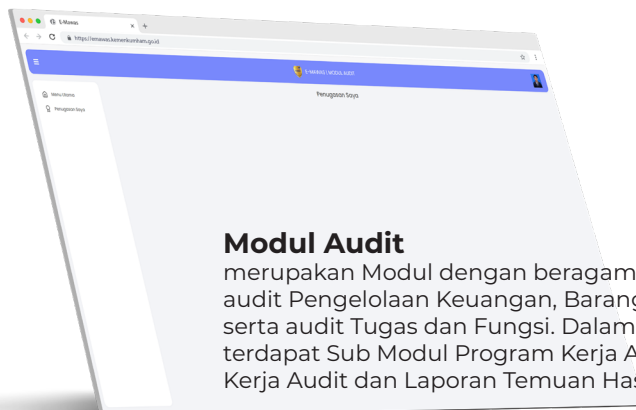
## Modul Evaluasi WBK/WBBM

merupakan modul yang dapat digunakan untuk Evaluasi dan Penilaian WBK/WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



## Modul Perencanaan Penugasan

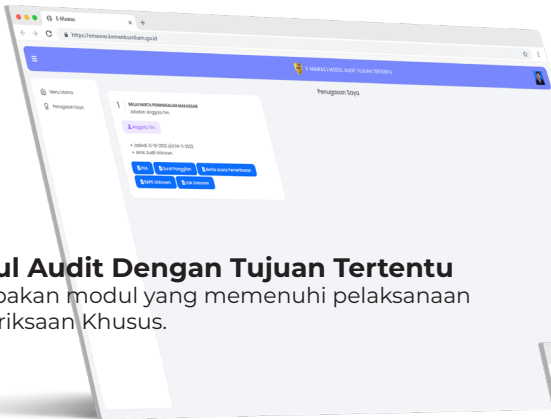
merupakan modul utama dalam pembuatan rencana penugasan pengawasan berupa Penyusunan Tim, Surat Perintah, Notula Rapat Persiapan sampai dengan RAB Pelaksanaan Kegiatan serta pertanggung jawaban keuangannya.



## Modul Audit

merupakan Modul dengan beragam pelaksanaan audit Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa, serta audit Tugas dan Fungsi. Dalam modul Audit terdapat Sub Modul Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan Laporan Temuan Hasil Audit.

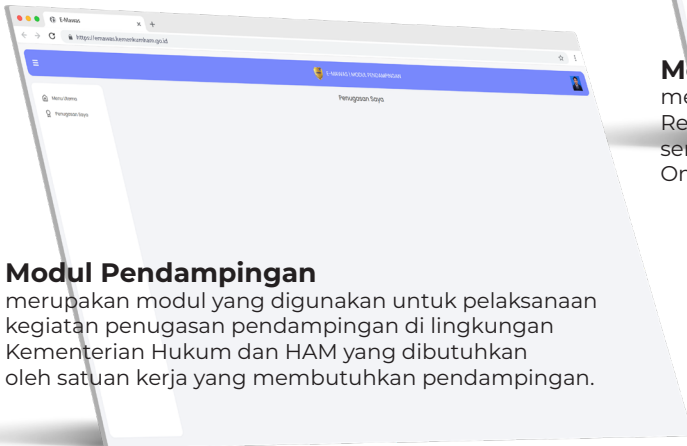
**Modul Audit Dengan Tujuan Tertentu** merupakan modul yang memenuhi pelaksanaan Pemeriksaan Khusus.



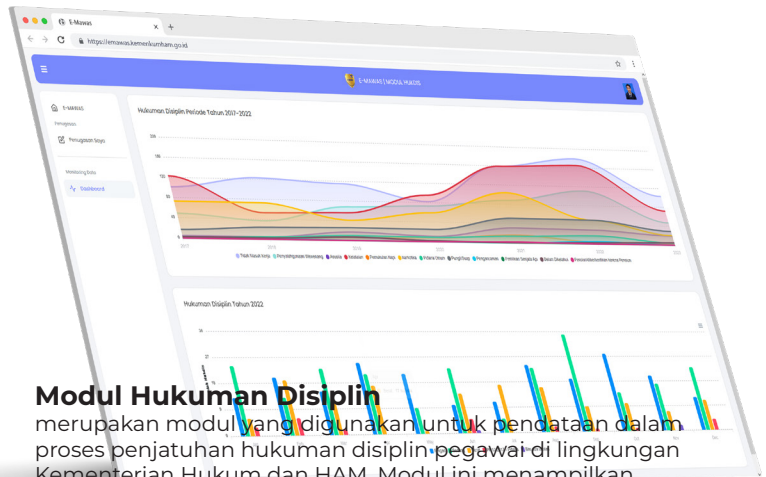
**Modul Audit Pengawasan Lainnya** merupakan modul yang digunakan untuk pelaksanaan Reviu, Manajemen Risiko, SPIP, Pelayanan Publik, SAKIP, serta Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Ombudsman Republik Indonesia.



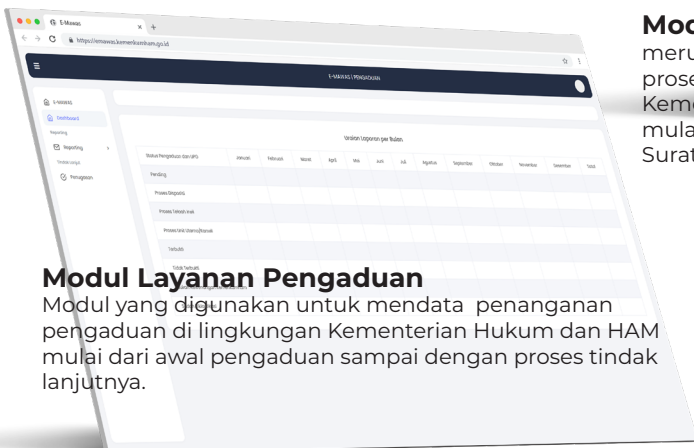
**Modul Pendampingan** merupakan modul yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penugasan pendampingan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang membutuhkan pendampingan.



**Modul Hukum Disiplin** merupakan modul yang digunakan untuk pendataan dalam proses penjatihan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Modul ini menampilkan mulai dari proses awal sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Hukuman Disiplin.



**Modul Layanan Pengaduan** Modul yang digunakan untuk mendata penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mulai dari awal pengaduan sampai dengan proses tindak lanjutnya.







Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

# ITJEN *LAUNCHING* APLIKASI SERAYA

Seraya (Sistem Pelaporan Harta Kekayaan) merupakan aplikasi berbasis web yang dilakukan untuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara Mandiri dan untuk pengelolaan LHKASN yang dilakukan oleh Administrator pada tingkat kementerian, Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT dengan tujuan peningkatan kepatuhan pelaporan LHKASN yang lebih terukur, cepat, akurat, efektif dan efisien.

**J**akarta – Selain melakukan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hari ini Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga melaksanakan kegiatan Soft Launching Aplikasi Sistem Pelaporan Harta Kekayaan (SERAYA). SERAYA dibuat sebagai pembaruan dari Sistem Pelaporan Harta Kekayaan melalui aplikasi e-LHKASN ([lhkasn.kemenkumham.go.id](http://lhkasn.kemenkumham.go.id)) dan sebagai tindak lanjut

dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-1.PW.02.03 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemenkumham.

“Implementasi Keputusan Menteri terkait kebijakan baru tersebut, kami melakukan pengembangan terhadap fitur-fitur pelaporan LHKASN yang mampu memberikan data yang lebih aktual, tepat, cepat sesuai kebutuhan organisasi sesuai karak-

teristik Kemenkumham serta mampu menciptakan sinergitas dalam pengelolaan LHKASN antar administrator LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi tersebut dinamakan SERAYA : Sistem Pelaporan Harta Kekayaan,” jelas Yayah Sekretaris Inspektorat Jenderal memberikan laporan terkait aplikasi tersebut.





Melalui laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, membuktikan bahwa Inspektorat Jenderal berkomitmen menciptakan serta mengembangkan layanannya sesuai kebutuhan organisasi, dalam hal ini aplikasi pelaporan harta kekayaan. Hal senada juga disampaikan Inspektur Jenderal Razilu dalam sambutannya bahwa Aplikasi Seraya yang diciptakan Inspektorat Jenderal menjadi bukti Inspektorat Jenderal dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berbas akuntabilitas, dimana setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. ASN sebagai aparatur yang digaji dari uang masyarakat, sudah sepatutnya setiap harta kekayaan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan tidak bersumber dari perilaku-perilaku pelanggaran terhadap integritas dan aturan yang berlaku.

“Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya”, ucap Razilu.

Lebih lanjut, bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara bagi ASN di luar kategori tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Perlu diketahui aplikasi SERAYA ini merupakan salah satu inovasi yang akan memberikan manfaat yang besar bagi Kemenkumham. Sebab sebagaimana diketahui, pelaporan LHKASN menjadi salah satu aspek yang akan mengakselerasi nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian, utamanya di komponen penguatan pengawasan”, ujar Razilu

Tak luput Beliau juga mengapresiasi pembangunan aplikasi SERAYA, sebab aplikasi ini lahir dari talenta-talenta murni Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Inspektorat Jenderal.

“Saya sangat mengapresiasi pembangunan aplikasi SERAYA. Ini membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia Kemenkumham khususnya Inspektorat Jenderal memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, ucap Razilu

*cerita dibalik lahirnya*

# WEBSITE SERAYA





Bagaimana project pengembangan website LHKASN bisa ditugaskan kepada Sdri Sherly dan Sdr Zaidal? Atau dapat dikatakan sebagai PIC, tentunya tidak menutup mata bahwa hasil pengembangan website ini juga kerjasama antara seluruh Pejabat/Pegawai yang terlibat?



Bahwa salah satu tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengelolaan laporan harta kekayaan aparatur sipil

negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelompok Susbstansi Kepegawaian dalam hal ini yang melaksanakan fungsi tersebut di lapangan. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pelaporan harta kekayaan tahun 2019 s.d. 2021, perlu dilakukan pengembangan aplikasi pelaporan harta kekayaan yang lebih mampu memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal pelaporan dan pengelolaan laporan harta kekayaan. Development aplikasi SERAYA dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Kepegawaian dan unsur TI (dari Humas dan SIP). Kami berdua ditugaskan untuk nge-lead project ini oleh Pimpinan.

Setelah mendapatkan tugas tersebut, apakah ada misi tersendiri/ekspetasi yang diinginkan dalam pengembangan website LHKASN?



Kemenkumham memiliki aplikasi penyelenggaraan harta kekayaan yang lebih terukur, cepat, akurat, efektif, efisien serta dapat terintegrasi dengan aplikasi, baik

internal maupun eksternal, yang mampu mendukung tuisi Itjen

Apa yang mendasari perlunya dilakukan pengembangan website LHKASN menjadi SERAYA?



Bahwa pada tahun 2022, data jumlah ASN Kemenkumham pada tahun 2022 sebesar 65rb pegawai yang tersebar pada 11 unit Eselon I, 33 Kanwil dan lebih dari 800 UPT di

Indonesia. Dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan kondisi geografis tersebut, Kemenkumham harus memiliki aplikasi yang lebih 'luwes' dan 'cerdas' menerima serta mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi ke depan. Aplikasi yang mampu memendekkan jarak koordinasi antar pengelola SERAYA, mempercepat tindak lanjut monitoring pelaporan harta kekayaan, dan menyelaraskan data kepegawaian yang semuanya dilakukan melalui satu pintu, SERAYA. Informasi data yang disajikan pada aplikasi yang realtime, akurat, dan mudah dipahami maka memudahkan pimpinan mengambil keputusan dengan cepat

Bagaimana proses pemilihan nama SERAYA? Apakah ada cerita tersendiri dalam pemilihan nama tersebut?



SERAYA, Sistem Pelaporan Harta Kekayaan. Kalau dilihat dari arti suku katanya, SE artinya SATU.

RAYA adalah BESAR. Jadi Kemenkumham itu memiliki SATU aplikasi yang menyelenggarakan pelaporan harta kekayaan untuk Aparatur Negara-nya yang akan menjadi BESAR seiring dengan fitur-fitur yang dimiliki dan data yang tersimpan di dalamnya dari tahun ke tahun untuk mendukung kebutuhan organisasi, khususnya dalam bidang pengawasan dan consulting.

Pemilihan nama SERAYA sendiri secara spontan kami sampaikan saat rapat demo aplikasi ini bersama Inspektur Jenderal, Bapak RAZILU pada awal Januari 2023.

Kemudian, bagaimana dibalik proses pembuatan logo SERAYA?



Logo SERAYA cukup panjang dalam pemilihannya. Mulai dari pemilihan warna, simbol grafis dan makna dari perpaduan 2

unsur tersebut mengingat logo ini harus memiliki makna yang kuat, tegas, dan selaras dengan 'skills' yang dimiliki SERAYA yang udah keren dibangun oleh Pak Zaidal, Pak Wahyu dan Tim.

Setelah bereksperimen dengan berbagai simbol grafis, akhirnya dipilih logo SERAYA saat ini. SERAYA memiliki 2 warna utama yaitu keemasan dan biru tua yang merefleksikan semangat, kreativitas, inovasi tiada henti yang menuju ketepatan, kevalidan data serta mencerminkan INTEGRITAS. Bentuk huruf S dan Kubah Emas merupakan kesinambungan dalam pelaporan harta kekayaan Insan Pengayoman.

Bagaimana dukungan pimpinan dalam pengembangan website ini?



Pimpinan dan seluruh rekan-rekan khususnya di Kepegawaian serta Humas SIP sangat mendukung dan membantu

dalam bentuk partisipasi dan kemudahan dari mulai proses pembangunan SERAYA, perumusan dasar hukum penyelenggaraan harta kekayaan di lingkungan Kemenkumham, soft launching SERAYA, sosialisasi penggunaan SERAYA, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi pelaporan harta kekayaan.

Seperti yang kita ketahui bahwa website LHKASN sebelumnya memang sudah ada, Apa hal yang membedakan website LHKASN sebelumnya dengan Seraya?



Aplikasi e-LHKASN merupakan aplikasi yang telah mampu dan berhasil mengubah sistem pelaporan manual menjadi pelaporan yang berbasis web, sesuatu yang tetap harus kita apresiasi.

Beberapa keunggulan SERAYA diantaranya adalah SERAYA memiliki beberapa fitur yang:

1. Mampu memudahkan Administrator melakukan pendaftaran Wajib Laport dengan cepat dan tepat melalui fitur Import data Pelapor;
2. Mampu memudahkan Administrator dalam memonitoring dan menindaklanjuti progress pelaporan harta kekayaan melalui fitur resume kepatuhan dan fitur GAMIFICATION yang saat ini sedang didevelop oleh Pak Zaidal;
3. Mampu menyimpan data Pelapor dan history pelaporan dari tahun ke tahun.
4. Progress Pendaftaran Pelapor dan pelaporan LHKASN terupdate secara otomatis melalui email Pelapor dan inbox akun SERAYA Pelapor

Selain itu, SERAYA telah memiliki fitur monitoring BPE SPT Pajak Tahunan seluruh Aparatur Negara di lingkungan Kemenkumham, yang seperti kita ketahui bersama hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

Bagaimana proses menentukan/mengklasifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan dalam website LHKASN sebelumnya?



Kita membuat PICA (Problem Identification and Corrective Action), yaitu pemetaan masalah yang dihadapi dalam pelaporan harta kekayaan sampai dengan tahun 2022, kemudian diidentifikasi akar permasalahannya (root cause) untuk selanjutnya ditetapkan langkah perbaikan melalui fitur-fitur yang akan didevelop pada SERAYA. 2 stream Fitur utama SERAYA terbagi menjadi 3 : Fitur Pelapor, Fitur Administrator, Fitur Verifikator.

Bagaimana kesulitan yang dihadapi saat melakukan pengembangan website LHKASN? Termasuk juga dalam mendevlop website SERAYA?



Membangun rumah yang baru dari 0 tentunya bukan pekerjaan yang semalam jadi. Pak Zaidal dan Tim yang selama ini berkolaborasi intensif dengan kami untuk menetapkan milestone pembangunan dan pengembangan SERAYA. Effort terbesar yang kami hadapi adalah waktu. Berkejaran dengan waktu agar pelaporan tahun 2023 sudah dengan aplikasi ini, disamping kami melakukan tugas-tugas yang lainnya.

Seperti yang kita lihat bahwa grafis tampilan website SERAYA lebih fresh, apakah ada referensi tersendiri dalam memvisualisasikan tampilan website SERAYA?



Sesuai dengan logo SERAYA yang merefleksikan semangat, kreativitas, inovasi tiada henti, sehingga kami berusaha memberikan tampilan terbaik dan tidak menutup kemungkinan apa yang ada saat ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

Butuh waktu berapa lama pengembangan website ini dilakukan?



Awal kali kami ketemu (Kepegawaian dan IT) untuk pembahasan rencana pembangunan aplikasi sekitar bulan April 2022. setelah pertemuan pertama ini Pak Zaidal, Pak Wahyu dan TIM mulai gas pol dalam pembangunan SERAYA. 8 bulan sejak saat itu alhamdulillah kami dapat mendemokan hasilnya kepada Inspektur Jenderal pada Januari 2023.

Website SERAYA telah disosialisasikan dan digunakan oleh seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kemenkumham, dalam perjalannya apakah terdapat hal-hal yang menjadi evaluasi dalam pengembangan website SERAYA?



Ya, monitoring dan evaluasi secara masif kami terus lakukan sampai hari ini, diantaranya terkait:

- a. Keefektifan Fitur-fitur yang ada pada SERAYA;
- b. Potensi error penggunaan SERAYA;
- c. Perluasan pengolahan data pelaporan Pelapor;
- d. Tingkat Pemahaman Pelapor dan Administrator dalam penggunaan SERAYA;
- e. Kecepatan pada setiap proses SERAYA.

Sebagai penutup, Menurut kalian, Apakah pengembangan Website LHKASN menjadi SERAYA merupakan bagian dalam transformasi pengawasan berbasis digital?



Pasti, SERAYA memiliki fitur-fitur pelaporan dan pengelolaan laporan harta kekayaan yang realtime dan komprehensif dengan pengolahan data yang tersaji dalam visualisasi dashboard-dashboard pada aplikasi serta dilengkapi dengan pengamanan (cyber security network), notifikasi pelaporan dan pengelolaan laporan harta kekayaan yang terintegrasi dengan email Pelapor, serta hal-hal strategis lainnya.

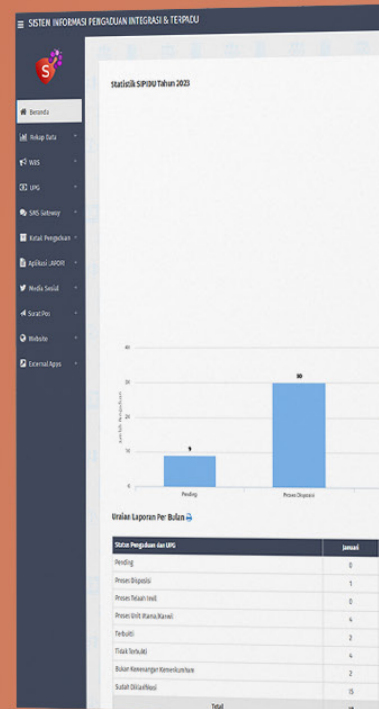


Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham



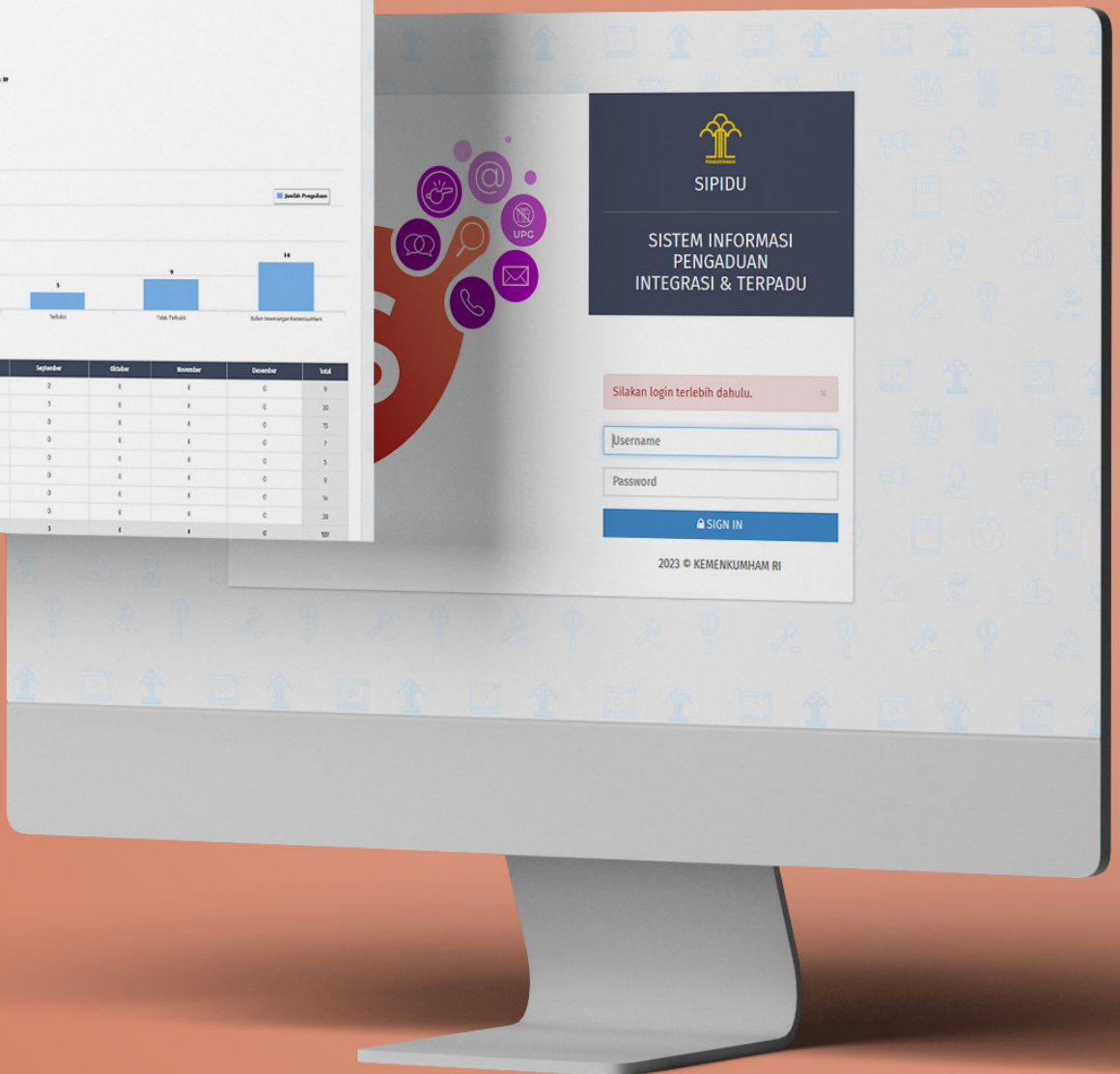
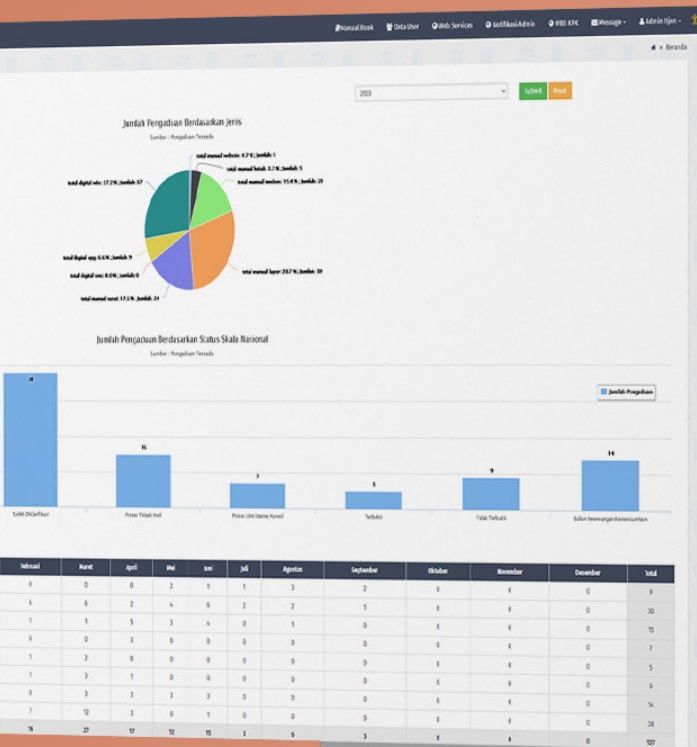
# sistem informasi PENGADUAN INTEGRASI & TERPADU

**Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU)** merupakan website yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dalam pengelolaan dan Pengolahan Data Pengaduan secara Terintegrasi dan Terpadu yang menggabungkan data Pengaduan baik secara Digital dan Manual, Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh data Pengaduan yang akurat dan berkualitas.



**Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU)** terintegrasi dengan beberapa media pengaduan diantaranya yakni :

1. Pengaduan Berbasis Online ([wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id))
2. Pelaporan Gratifikasi Berbasis Online ([upg.kemenkumham.go.id](http://upg.kemenkumham.go.id))
3. Layanan Pengaduan Berbasis SMS (*SMS Gateway*)
4. Kotak Pengaduan
5. Aplikasi Laporan!
6. Media Sosial
7. Surat Pos
8. Website
9. Aplikasi Eksternal







[wbs.kemenkumham.go.id](https://wbs.kemenkumham.go.id)



Laporan Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan menggunakan saluran pengaduan melalui [wbs.kemenkumham.go.id](https://wbs.kemenkumham.go.id).

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran & penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Siapa-siapa saja yang bisa melaporkan melalui aplikasi Whistleblowing System?

1. Aparatur Sipil Negara pada Kemenkumham
2. Masyarakat Umum

Apa saja Pelanggaran dan Penyimpangan yang bisa dilaporkan

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/Penganiayaan
3. Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA
6. Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

# LAPORAN GRATIFIKASI

*berbasis digital*





Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas Kedinasan atau di luar tugas Kedinasan.\*

Laporan penerimaan Gratifikasi dapat disampaikan melalui secara digital *upg.kemenkumham.go.id* dan akan diteruskan kepada KPK melalui Aplikasi Gratifikasi Online KPK *gol.kpk.go.id/* oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat.

*\*Permenkumham No 58. Th.2016 Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kemenkum HAM*

SISTEM PELAPORAN GRATIFIKASI
Home Pelaporan Contact Us

---

Home » Laporan » Create

## Laporan Tindak Gratifikasi

Isilah data secara lengkap, karena sangat diperlukan untuk pengiriman informasi.

[download rincian isian form disini](#)

### Form Identitas

**Form Identitas**

**Nama Lengkap \***

**Pangkat \***  **NIP \***

**Jabatan \***  **Unit Kerja \***  **Kantor**

**Alamat Kantor \***

---

**Tempat Lahir \***  **Tanggal Lahir \***

**Eselon \***  **Status Pelapor \***

**Alamat yang dapat dihubungi \***

**Kota/Kabupaten \***  **Provinsi \***  **Negara \***

**Telepon Seluler \***  **Telepon Rumah**  **Email \***

### Form Gratifikasi

**Form Gratifikasi**

**Jenis Pemberian \***  **Bentuk Pemberian \***  **Nilai EQ Rp \***







<https://simwas.kemenkumham.go.id/>



# APA itu? SIMWas?

Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk mengintegrasikan data hasil pengawasan. SIMWas secara umum memiliki 3 (tiga) Manajemen Utama yaitu:

1. Manajemen Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal (Internal)
2. Manajemen Hasil Pengawasan BPK, BPKP, ORI (Eksternal)
3. Manajemen Data Hukuman Disiplin.

Pengintegrasian data hasil pengawasan pada aplikasi SIMWas secara umum memberikan akses pada Login di Tingkat Kanwil untuk melakukan Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan dan pengelolaan data proses penjatuhan hukuman disiplin melalui perangkat elektronik yang terhubung ke Internet dimanapun dan kapanpun.

Pada tingkat Kantor Wilayah akan diberikan 2 login yaitu :

1. Admin Tindaklanjut (Mencakup Manajemen Hasil Pengawasan);
2. Admin Hukdis (Mencakup Data Hukdis).

Adapun fungsi dari SIMWas diantaranya :

1. Untuk database yang lengkap dan valid terkait hukdis, Tindak Lanjut Temuan BPK, dan Tindak Lanjut Temuan ITJEN;
2. Untuk Monitoring Proses Hukuman Disiplin, Proses TL Temuan BPK dan ITJEN;
3. Untuk Pembinaan Pegawai;
4. Untuk acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan.



# Program

## Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi dan Motivasi (Gerbang Transisi) untuk Mewujudkan Keagungan Kemenkumham

Kegiatan diperuntukkan bagi satuan kerja Kemenkumham sebagai kelanjutan program 3M (Menyapa, Mengajarkan, dan Menyadarkan) sekaligus bertujuan untuk memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi satuan kerja.



## Sertifikasi API, PAKSI, dan CRMO serta Resertifikasi ISO SMAP

API (Ahli Pembangunan Integritas) merupakan sertifikasi untuk menjadikan auditor selaku APIP untuk menjadi role model dalam penerapan Integritas dan mampu berperan aktif mengawal dan menjaga integritas manajemen

PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) merupakan sertifikasi yang pada tahap awal ditunjukkan untuk pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai di luar Inspektorat Jenderal

CRMO (Certified Risk Management Officer) merupakan sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian analisis manajemen risiko organisasi terintegritas yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP merupakan standar Internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan berupa regulasi atau kebijakan internal dalam suatu organisasi yang berguna sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktek penyuapan.



# 2023 Unggulan

## Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi

Kegiatan para Inspektur Wilayah ke satuan kerja, diutamakan satuan kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan konsultasi ke satuan kerja.



## Aktif Belajar Plus

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) Tahun 2021 dan Aktif Belajar Tahun 2022. Kelebihan dari Aktif Belajar Plus adalah menambah jumlah hari dan materi jam pelajaran (JP), menambah materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual untuk mencetak insan APIP yang mampu mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan HAM.

## E-MAWAS ver. 2023

Merupakan aplikasi digital yang terdiri dari 8 (delapan) modul yaitu modul rencana penugasan, evaluasi WBK/WBBM, audit, audit tujuan tertentu, pengawasan lainnya, pendampingan, hukuman disiplin dan modul layanan pengaduan yang bertujuan meningkatkan layanan pengawasan melalui sistem single sign on

# GERBANG TRANSISI

*Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi dan Motivasi*



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

# Mengenal GERBANG TRANSISI

Gerbang Transisi ( Bergerak Bangkitkan Kesadaran Motivasi dan Inspirasi) memiliki tujuan dalam pelaksanaannya diantaranya yakni :

1. MEMBANGKITKAN KESADARAN PERAN STRATEGIS KEMENKUMHAM;
2. MENYADARKAN BAHWA SETIAP ASN LAKSANA PISAU BERMATA DUA;
3. MEMBERIKAN MOTIVASI UNTUK BERKONTRIBUSI SECARA KREATIF;
4. MEMBERIKAN MOTIVASI TENTANG PENTINGNYA MENJADI PRIBADI YANG UTUH, INSAN KAMIL, DAN INSAN PENGAYOMAN SEJATI;
5. MEMBERIKAN BERAGAM INSPIRASI UNTUK MENJADI INSAN YANG INOVATIF DAN KREATIF;
6. DALAM JANGKA PANJANG, UNTUK MENEKAN DAN ATAU MENGURANGI PENYIMPANGAN PELANGGARAN.

Adapun 3 Fokus Utama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Razilu, diantaranya yakni:

**AREA KESADARAN**  
**AREA MOTIVASI DAN INSPIRASI**  
**GAYA HIDUP ASN**



# AREA KESADARAN

## *apa yang dipaparkan?*

Pada area kesadaran, Inspektur Jenderal Razilu menggambarkan bahwa Kementerian ini bagaikan kapal besar dengan pegawai sebagai awak kapalnya. Oleh karenanya, setiap awak kapal haruslah satu visi-misi sehingga kapal sampai tujuan dengan selamat.

Tak hanya itu, pada area kesadaran Razilu juga menjelaskan perbedaan antara Bos dengan Pempimpin, hal ini dipaparkan olehnya pada kegiatan Gerbang Transisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.





# AREA MOTIVASI DAN INSPIRASI

## apa yang dipaparkan?

Pada area Motivasi dan Inspirasi, Inspektur Jenderal Razilu mengingatkan kembali Resolusi Kemenkumham 2023 yaitu Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ihklas dan hasilnya akuntabel. Dalam mendukung resolusi tersebut setiap pegawai harusnya memiliki Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ) yang tinggi.

Razilu juga menceritakan kisah inspiratif mengenai Majikan Dan Penebang Pohon, Angsa Bertelur Emas, Kemudian, Ia juga menjelaskan terkait dengan Kepekaan Tentang Emosi dan Pendekatan Franklin Covey terkait Kinerja Prima Berkelanjutan yang dipaparkan olehnya pada kegiatan Gerbang Transisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham



# GAYA HIDUP ASN

## apa yang dipaparkan?

Pada area Gaya Hidup ASN, Inspektur Jenderal Razilu menyampaikan apa yang menjadi atensi Menteri Hukum dan HAM untuk menerapkan pola hidup sederhana, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Yasonna meminta seluruh jajaran agar dapat mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun di media sosial. Menempatkan diri dengan pola hidup yang sederhana, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ia berharap sikap rendah hati, humanis, dan simpatik untuk lebih dikedepankan.

1. TIDAK BOLEH JUMAWA
2. TIDAK BOLEH PAMER KEKUASAAN
3. TIDAK BOLEH PAMER KERAYAAN
4. TIDAK BOLEH BERGAYA HIDUP MEWAH
5. WUJUDKAN BIROKRASI  
KEMENKUMHAM YANG MELAYANI





Gerbang Transisi Pada Tahun 2023

TELAH TERLAKSANA DI

1679

Kantor  
Wilayah

Unit  
Pelaksana  
Teknis



PROGRAM UNGGULAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

# AKTIF BELAJAR PLUS<sup>+</sup>

MERUPAKAN KELANJUTAN DARI  
GEMAR BELAJAR TAHUN 2021 DAN AKTIF BELAJAR TAHUN 2022.  
KELEBIHAN DARI AKTIF BELAJAR PLUS ADALAH SECARA KHUSUS  
MENAMBAH MATERI KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL  
UNTUK MENCETAK LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF  
DAN SUPORTIF SERTA INSAN APIP YANG MAMPU  
MEWUJUDKAN KEAGUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.



# MATERI YANG DIPELAJARI

- Implementasi Manajemen Resiko Fokus pada Pemantauan Penanganan Resiko dan Penyusunan Laporan Manajemen Resiko
- Internalisasi Core Values BerAkhlaq dan 10 pesan Inspektur Jenderal

**6JP**  
**JANUARI**

- Healty Safety and Environment (HSE) Training
- Audit Khusus atas kasus tertentu disertai dengan penyusunan laporan dari menyusun konsep permasalahan, data, analisis, pendapat, simpulan dan saran
- Mekanisme dan Implementasi SPBE pada Instansi Pemerintah

**9JP**  
**FEBRUARI**

- Meningkatkan Integritas ASN dalam membangun budaya Anti Gratifikas dan Anti Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Pengadaan Barang dan Jasa secara swakelola

**9JP**  
**MARET**

- Knowing Toxic Workplace and Toxic Personalities
- Unit Kepatuhan Internal
- Pengelolaan Penanganan Pengaduan

**9JP**  
**APRIL**

- Pendidikan Karakter dalam Rangka Mewujudkan APIP Kemenkumham BerAKHLAK dan PASTI PINTAR
- Permanpan RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
- Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**9JP**  
**MEI**

- Manajemen Konflik
- Konsekuensi/Dampak JFA Terkena Hukuman Disiplin
- Pengelolaan Arsip Dinamis

**9JP**  
**JUNI**



# MATERI YANG DIPELAJARI

- Penerapan Benturan Kepentingan
- Audit Teknologi Informasi Komunikasi
- Bimtek pengadaan elektronik, e-purchasing, e-catalog dan bela pengadaan

**9JP**  
**JULI**

- Public Speaking (Teknik Komunikasi)
- Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)

**9JP**  
**AGUSTUS**

- Personal Financial Budgeting and Financial Planning For ASN
- Pengelolaan BMN terkait Pemanfaatan, Penghapusan, dan Penetapan Status Penggunaan
- Teknik Penyusunan Policy Brief, Policy Memo, dan Policy Paper

**9JP**  
**SEPTEMBER**

- Pengaktifan Kembali Status PNS yang diberhentikan sementara
- Audit Tata Kelola Makro
- Teknik Fraud Investigation (Investigator Indonesia)

**9JP**  
**OKTOBER**

- Peran Perempuan dalam gerakan Anti Korupsi
- Membangun Keluarga Integritas

**6JP**  
**NOVEMBER**

- Peran ASN dalam Menghadapi Media Sosial di Tahun Politik

**3JP**  
**DESEMBER**



Jumlah  
Materi

32

Jam  
Pelajaran

96

**Ahli Pembangun Integritas** adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. API merupakan sertifikasi untuk menjadikan auditor selaku APIP untuk menjadi role model dalam penerapan Integritas dan mampu berperan aktif mengawal dan menjaga integritas manajemen.

Berbeda dengan Paksi yang menyuluh kepada masyarakat, API bergerak di ranah korporasi dan organisasi untuk menutup celah-celah korupsi dan suap. KPK memberi kesempatan bagi pegawai yang bergerak di bidang kepatuhan untuk berkontribu-

si bagi pemberantasan korupsi dengan kompetensi yang sesuai standar kualitas tertinggi.

Ada tiga skema API dengan unit kompetensinya masing-masing, yaitu API, API Muda, dan API Eksekutif.

AHLI  
PEMBANGUN  
INTEGRITAS

*Mengenal*

SERTIFIKASI

2

PENYULUH  
ANTI KORUPSI

**Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi** merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi antikorupsi bagi masyarakat. Latar belakang KPK melakukan Program Pengembangan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi bagi masyarakat adalah untuk STANDARISASI KOMPETENSI agar pelaksanaan penyuluhan dan tata kelola organisasi lebih efektif dan efisien.

Sertifikasi juga merupakan salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi KPK atas partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Sertifikasi Kompetensi Antikorupsi juga diharapkan meningkatkan kompetensi masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, karir, program-program pemberantasan korupsi, dan program-program KLOP lainnya.

**PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi)** merupakan sertifikasi yang pada tahap awal ditunjukkan untuk pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai di luar Inspektorat Jenderal.



Program Sertifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan staf yang menguasai Teknik dan Proses Manajemen Risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri. Setelah mengikuti pendidikan ini Peserta diharapkan dapat :

- Mempunyai cara pandang dan persepsi yang sama didalam memandang Risiko
- Membedakan ciri-ciri Risiko dan Kesempatan (opportunity)
- Memahami Proses, Scope dan kerangka kerja Enterprise Risk Management
- Mampu melakukan identifikasi risiko (dengan berbagai metode Identifikasi) pada proses bisnisnya masing-masing sehari-hari
- Mampu membedakan antara Risiko dan Penye-

bab.

- Memahami cara menentukan kriteria dalam penilaian besaran risiko (Risk Level).
- Mampu melakukan pengukuran bobot risiko pada tataran inherent risk, residual risk dan risk after mitigation
- Mampu membuat peta risiko
- Mampu membuat Risk Response awal/tanggapan terhadap risiko yang melekat pada aktifitas bisnisnya dan memahami tehnik membuat Risk Mitigation Action Plan
- Mampu membuat Risk Register yang informatif

# 3 CERTIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER

## 4 RE-SERTIFIKASI ISO 37001:2016 SMAP

Inspektorat Jenderal berhasil meraih Sertifikasi Internasional ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berhasil mempertahankan predikat tersebut selama 3 (tiga) tahun. Sebagai informasi, masa berlaku Sertifikasi Internasional ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah 3 (tiga) tahun.

Proses Re-Sertifikasi Internasional ISO 37001:2016 SMAP sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pihak Konsultan dan Lembaga Konsultasi;
2. Penyusunan dan Penetapan Tim Re-Sertifikasi Internasional ISO 37001:2016 SMAP;

3. Kick Off Meeting;
4. Gap Analysis yaitu mengukur perbedaan antara keadaan aktual kinerja suatu organisasi pada selang waktu tertentu dan keadaan yang diinginkan di masa depan;
5. Review dokumen pada Gap Analysis oleh konsultan;
6. Implementasi;
7. Training Internal Auditor ISO SMAP;
8. Pelaksanaan Internal Audit;
9. Review oleh Manajemen Puncak;
10. Audit eksternal, yang direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu ke-4 September 2023.



BEST AWARD

SERTIFIKAT INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA

*Pejabat/Pegawai Ijen K*

19 Pejabat/pegawai yang telah lulus sertifikasi PAKSI\*  
40 Pejabat/pegawai yang telah mengikuti e-learning  
10 Pejabat/pegawai yang telah lulus sertifikasi CRMO

\*data update Okto

SERTI

PAKSI (PE  
API (AHLI PEM  
CRMO (CERTIFIED RIS







# ITJEN RAIH KEMBALI RESERTIFIKASI ISO 37001: 2016 SMAP TAHUN 2023

Pada tahun 2023 ini Inspektorat Jenderal telah berhasil memperoleh resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), setelah pertama kali memperolehnya di tahun 2020 dan berhasil mempertahankan selama 2 tahun berturut-turut.

**J**akarta – Pelaksanaan Audit Eksternal oleh Tim TUV NORD dalam rangka Re-Sertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) memasuki babak selanjutnya. Exit Meeting Pelaksanaan Audit Eksternal ini dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I s/d VI, beserta Tim Auditee dari Inspektorat Jenderal. Sedangkan dari pihak auditor eksternal dihadiri Dodi Fadiat selaku Lead Auditor TUV Nord. Selasa (19/09)

Pada kesempatan tersebut, Dodi memaparkan Audit Report kepada seluruh Pimti Inspektorat Jenderal Kemenkumham beserta jajaran dengan hasil bahwa Inspektorat Jenderal meraih kembali Sertifikasi ISO 37001: 2016 SMAP pada tahun 2023.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu menyatakan apresiasinya kepada tim audit eksternal.

***“Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-***

***besarnya kami sampaikan kepada tim auditor eksternal dan tim konsultan yang senantiasa mendampingi kami dalam pelaksanaan serta implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),” ujar Razilu.***



Lebih lanjut, Razilu menyanggupi melakukan perbaikan yang disarankan oleh tim audit eksternal tersebut dan mengawal perbaikan-perbaikan tersebut agar dapat diselesaikan maksimal 3 bulan.

*“Banyak masukan dari hasil audit eksternal yang dapat kami gunakan untuk perbaikan dalam rangka memperkuat atmosfer anti penyusunan di Inspektorat Jenderal tercinta ini,” imbuhnya Razilu*

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan atau diperbaiki akan segera ditindaklanjuti, termasuk catatan mengenai Manajemen Risiko yang perlu sedikit dilakukan perbaikan.

Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham





# REVITALISASI UPP KEMENKUMHAM YANG BERAKHLAK

Inspektur Jenderal yang ditunjuk sebagai Ketua UPP Kemenkumham, mengajak seluruh anggota tim UPP Kemenkumham untuk merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini.

**P**ungutan Liar (Pungli) yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sudah acapkali menjadi budaya dan juga merusak sendi-sendi kehidupan bagi Masyarakat luas. Dalam perspektif hukum tindak pidana tentang arti dari Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan suatu pembayaran tersebut. Dampak dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta mengakibatkan biaya ekonomi menjadi tinggi.

Pungli sebenarnya merupakan gejala sosial yang telah ada sejak lama di Indonesia, sejak jaman penjajahan bahkan jauh sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar di Indonesia dan juga untuk meningkatkan eektivitas pemberantasan Pungutan Liar (Pungli), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang mempunyai tugas adalah memberantas Pungli secara tegas, terukur, efektif dan efisien, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku Pungli itu sendiri.

Saber Pungli. Pembentukan satuan tugas ini menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo

menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap pemberantasan pungli. Arahan Presiden sangat terang dan jelas, seperti yang sering kita dengar di berbagai kesempatan, termasuk pada saat penyampaian pidato Visi Indonesia Presiden secara tegas menyatakan bahwa :

***“Hati-hati, hati-hati ke depan (pungli) saya pastikan akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar jika diperlukan,” tegas Presiden.***



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

Sebagai bukti keseriusan dan komitmen Kemenkumham dalam menindaklanjuti Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, pada Tahun 2016, telah dilakukan Pengukuhan secara resmi Unit

Pemberantasan Pungli Kemenkumham, baik yang ada pada tingkat unit pusat maupun Kantor Wilayah. Pada tahun 2017 juga telah diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) UPP Kemenkumham untuk seluruh unit utama dan Kantor Wilayah. Dan pada Tahun 2023 dilaksanakan Workshop Pengutan UPP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan mengangkat tema "Revitalisasi UPP Kemenkumham yang BerAkhlak".

### Laporan Pengaduan Pungli

Berdasarkan Data Laporan Pengaduan yang dihimpun oleh UPP Kemenkumham, terdapat beberapa Laporan Pengaduan praktik pungli di Kemenkumham yang berasal Masyarakat maupun ASN Kemenkumham. Sejak 2018 – 2023 terdapat 111 laporan pengaduan terkait pungli

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jika dibandingkan dengan rata-rata total pegawai Kemenkumham, persentasenya adalah 0,17% (1,7 : 1000).

### Pencegahan Pungli

Data-data tersebut menjadi refleksi bagi UPP Kemenkumham dan memantik semangat untuk meningkatkan kinerja UPP dalam pemberantasan pungli, khususnya pada aspek pencegahan.

***"Selalu ingat "Prevention better than cure" mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah pungli jauh lebih baik daripada membiarkan dan mengatasinya setelah tindakan pungli itu terjadi.", ujar Razilu***



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham



## Sistem Pemberantasan Pungli Yang Optimal

Dalam kesempatannya, Inspektur Jenderal Razilu menjabarkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan sistem pemberantasan pungli yang optimal, antara lain :

1. Komitmen untuk “berperang” melawan pungli dari seluruh Insan Pengayoman;
2. Kejelasan Sistem / SOP / Prosedur di seluruh unit pelayanan Kemenkumham;
3. Intensifkan edukasi kepada masyarakat sehingga tercipta peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan yang diterima adalah hak mereka dan sudah kewajiban aparatur untuk memenuhi hak masyarakat serta kesadaran untuk melaporkan jika terdapat praktik pungli;
4. Pengawasan yang komprehensif dengan melibatkan satuan pengawasan internal di unit kerja (contoh: Sat Ops Patnal), sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, serta ombudsman di masing-masing wilayah;
5. Ciptakan sistem pengaduan yang baik yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan melihat progres tindak lanjut pengaduan;
6. Sinergikan upaya pemberantasan pungli dengan proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang telah dilakukan oleh seluruh satker di Kemenkumham;
7. Dorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh KPK.



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

## Revitalisasi dan Gelorakan Pemberantasan Pungutan Liar

Kepada seluruh Tim UPP, Inspektur Jenderal Razilu mengajak untuk merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan integritas. Hal ini menjadi penting untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



*"Saya atas nama Inspektur Jenderal yang ditunjuk sebagai Ketua UPP Kemenkumham, ingin mengajak kepada Saudara-saudara semua sebagai anggota tim UPP Kemenkumham untuk merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini, dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan integritas dalam upaya memberantas pungutan liar, sebagaimana core value yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan "BerAKHLAK" yang merupakan kepanjangan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif", ajak Razilu.*



Pada kesempatan yang lain, Inspektur Jenderal Razilu juga mengajak seluruh UPP Kantor Wilayah untuk merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Ada beberapa hal yang Razilu tekankan kepada UPP Kanwil dalam pemberantasan Pungli diantaranya :

**1.** Pengukuhan ini jangan hanya bersifat seremonial, harus ada kerja dan outcomes nyata dari pengukuhan UPP terhadap upaya pemberantasan pungli di Kemenkumham. Outcomesnya jelas, yakni

menurunnya bahkan hilangnya praktik pungli di seluruh sendi layanan Kemenkumham;

**2.** Setelah dikukuhkan, UPP harus sesegera mungkin menyusun peta risiko pungli serta program kerja yang bagus, dengan mengedepankan program pencegahan. UPP Kanwil juga wajib melaporkan perkembangan capaian program kerjanya secara berkala kepada Ketua UPP Kemenkumham;

**3.** UPP Kanwil perlu secara rutin memberikan edukasi kepada jajaran dan masyarakat bahwa pelayanan di Kemenkumham bebas dari

pungli dan mengedukasi masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika ditemukan ada oknum pegawai Kemenkumham yang melakukan praktik pungli;

**4.** Pastikan transparansi layanan terinformasi dengan baik kepada seluruh pengguna layanan. Masyarakat perlu tahu standar prosedur, waktu, hingga biaya layanan yang mereka ingin akses. Ini untuk membantu menutup celah terjadinya praktik pungli;

**5.** Ciptakan sistem pengaduan yang baik yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan melihat progres tindak lanjut pengaduan;



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham



**6.** UPP Kanwil perlu memberikan perlindungan kepada pelapor praktik pungli di Kemenkumham;

**7.** UPP Kanwil perlu secara intens berkoordinasi dengan UPP Pemda setempat, sehingga jika di kemudian hari ditemukan adanya praktik pungli yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham, tidak langsung di OTT oleh UPP Pemda, melainkan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada UPP Kanwil untuk selanjutnya dilakukan tindakan pembinaan secara internal;

**8.** UPP Kanwil harus menjalin kerjasama yang baik dengan Ombudsman Perwakilan di daerah masing-masing sebagai salah satu lembaga yang akan membantu pengawasan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;

**9.** Sinergikan upaya pemberantasan pungli dengan proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang telah dilakukan oleh seluruh satker di Kemenkumham;

**10.** Ciptakan role model dengan memilih Duta Integritas atau mendorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh KPK.



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

### Rakernas Satgas Saber Pungli, Kemenkumham Raih Penghargaan Kementerian Terinovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meraih penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga Terinovatif dengan membuat aplikasi pengaduan pungutan liar yang terdapat dalam kanal aplikasi Whistleblowing System (WBS) pada Rapat Kerja Nasional Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Rakernas Satgas Saber Pungli) 2023 di Hotel Millennium,

Jakarta Pusat.

Hal yang diapresiasi oleh Satgas Saber Pungli ialah komitmen Kemenkumham dalam berinovasi dan penerapan SPBE dalam meminimalisir potensi pungutan liar. Salah satunya ialah melaksanakan inventarisir implementasi SPBE di lingkungan unit kerja.

Kegiatan Rakernas Satgas Saber Pungli 2023 ini diikuti oleh Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) seluruh Provinsi dan Kementerian/Lembaga se-Indonesia secara hybrid.



# PERAN INSPEKTORAT JENDERAL PADA PELAKSANAAN SPBE DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM

Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perlu didukung dengan kegiatan pengawasan intern dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities), dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah (added value) dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

**P**erkembangan masyarakat di era digital sangat lah cepat, sehingga menuntut kita untuk terus melakukan perbaikan pada pelayanan. Perlu kita sadari bahwa pelayanan dan inovasi yang

telah kita banggakan sebelumnya, mungkin saat ini di mata masyarakat sudah dianggap ketinggalan zaman.

Menanggapi situasi tersebut, Bapak Menteri Hukum dan HAM

telah me - launching Revolusi Digital pada tahun 2020 yang lalu. Selain itu juga telah diterbitkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE sendiri ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan terpadu.

Dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran dalam pengawasan intern dengan melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria**

**dan/atau standar yang telah ditetapkan.**

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :

1. Audit Infrastruktur;
2. Audit Aplikasi;
3. Audit Keamanan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pada pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Pedoman Audit Teknologi Informasi melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ-11. OT.02.02 Tahun 2022 tentang Standar dan Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.





Standar dan Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi atas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib diterapkan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern atas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

**B.** Memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan layanan Audit yang bernilai tambah;

**F.** Mewujudkan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM, sejalan dengan prioritas nasional Kementerian Hukum dan HAM serta dinamika perubahan lingkungan.

Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

Standar dan Tata Cara pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (TIK SPBE) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku APIP terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang meliputi :

**1.** Standar Umum Audit TIK SPBE;

**2.** Standar Teknis dan Tata Cara Audit, yang terdiri dari Standar Teknis dan Tata Cara Audit Infrastruktur SPBE; Standar Teknis audit dan Tata Cara Audit Aplikasi Khusus SPBE; dan Standar Teknis dan Tata Cara Audit Keamanan SPBE.



Adapun tujuan dari Standar dan Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi atas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain :

**A.** Memberikan panduan dalam pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan

**C.** Menetapkan dasar dalam mengevaluasi kinerja Pengawasan Intern;

**D.** Mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi;

**E.** Mewujudkan keselarasan antara kondisi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan/atau standar yang telah ditetapkan;





Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Inspektorat Jenderal menggandeng BRIN dan BSSN telah melakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap beberapa infrastruktur Informasi Teknologi maupun layanan di Kementerian Hukum dan HAM, antara lain : Audit Aplikasi Permohonan Merek, Audit Infrastruktur pada Ditjen AHU, Audit Aplikasi PT (Perseroan Terbatas) pada Ditjen AHU, dan Audit Keamanan pada PUSDATIN.

Tentunya, peran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat meningkatkan indeks SPBE Kementerian Hukum dan HAM di Tahun 2023 yang ditargetkan meningkat meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan.



# ITJEN KEMENKUMHAM RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI MITRA GIA CORPU TERKOLABORATIF 2023

**J**akarta – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, hadir sekaligus menerima secara langsung penghargaan dalam kegiatan Learning Forum Pengembangan Kompetensi APIP Tahun 2024 dengan tema “Membangun Sinergitas APIP dan GIA Corpu dalam Pengembangan Kompetensi Auditor Intern Berkelanjutan”. Turut hadir mendampingi Irjen, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala

Bagian PPL beserta jajaran. Kegiatan ini juga turut mengundang Para Inspektur Jenderal dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Jumat (15/09)

Di awal sambutan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan beberapa pesan terkait penyelenggaraan audit.

***“Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi***

***prioritas, dengan anggaran dan SDM yang terbatas. Maka pada kegiatan ini kita bisa sharing,” ungkap Yusuf.***

Dirinya juga menyebutkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga harus mampu melakukan manajemen resiko. Menurutnya, pertemuan ini

menjadi penting karena merupakan wadah untuk sharing knowledge antar Kementerian dan Lembaga. Ia juga menyampaikan masing-masing Kementerian dan Lembaga tentunya memiliki pengalaman dalam bidang audit dan juga resiko yang berbeda-beda, sehingga pertemuan ini akan menghasilkan integrasi serta sinergi antar Kementerian dan Lembaga.

Selanjutnya, Yusuf Ateh menyerahkan penghargaan sebagai apresiasi kepada Kementerian dan Lembaga termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Mitra GIA Korpu Terkolaboratif Tahun 2023.

Tak luput Inspektur Jenderal Razilu menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BPKP berupa piagam dan plakat. Selain itu, GIA Corpu juga memberikan penghargaan

dengan mempertimbangkan jumlah peserta terbanyak diklat JFA dan diklat non teknis, tingkat kelulusan JFA, peningkatan hasil pembelajaran peserta, serta dampak bagi organisasi.







Dokumentasi :  
BSK Kemenkumham

# YAYAH

## Mariani

Wawancara eksklusif bersama salah satu Pimpinan Tinggi Pratama yang lahir dari rahim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 1994. Dialah Yayah Mariani yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal. Ia akan membagikan kisah inspiratifnya selama menaiki anak tangga kepemimpinan yang telah ditorehkan selama berkarir di Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga akan membagikan kisah masa kecilnya, keluarga dan pandangannya terkait dengan transformasi pengawasan berbasis digital.

### masa kecil & keluarga

*Berbicara tentang keluarga ibu, boleh diceritakan background keluarga Ibu seperti apa mulai dari orang tua maupun saudara-saudara Ibu?*

Saya ini anak pertama dan saya punya adik 5 (lima), dan juga kebetulan kita lain ibu. Jadi kami ditinggal orang tua, adik-adik kami baru SMP. Saya masuk Inspektorat Jenderal Kemenkumham di tahun 1994, dan saya ditinggal kedua orang tua saat saya masih Kasub (Kepala Sub Bagian) di LHP I yang tugasnya sangat banyak, urusan hukuman disiplin, ya dulu itu 33 provinsi ditangani oleh saya sendiri pada saat itu yang luar biasa prosesnya. Alhamdulillah saya merasa saya memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Saya melaksanakannya dengan pertama adalah saya menghadirkan Tuhan di

dalam hidup saya, rasa bersyukur, dan rasa takut dengan yang Maha Kuasa. Apa yang saya lakukan, saya berusaha itu yang terbaik, dan berusaha bermanfaat bagi banyak orang. Ya mungkin saya sifatnya tegas, kelihatannya kayak galak gitu ya, tapi sebenarnya saya orangnya apa adanya, kalau memang saya harus melakukan perbaikan terhadap seseorang, saya akan katakan yang sesungguhnya. Saya akan memberikan solusi, bahwa anda harus melakukan perbaikan seperti apa, jadi mungkin kesan yang pertama pasti adalah saya orang yang galak. Kita lihat saja dengan tuntutan yang sekarang, ya memang kita harus kerja seperti itu, harus berkinerja tidak lagi kerja menunggu suatu tugas, kita harus pahami tugas itu. Jadi sama halnya juga saya dengan keluarga gitu, saya berenam keluarga dengan adik-adik saya, semua saya jalani. Begitu juga dengan anak-



anak saya, kami duduk bersama, biasa saya kalau ada masalah saya dudukkan bersama saya, diskusikan, saya pecahkan permasalahannya. Jadi antara saya, anak saya, dan adik-adik saya punya komitmen yang sama gitu. Jadi alhamdulillah, perjalanan saya sampai saat ini Allah beri kelancaran. Di Inspektorat Jenderal ini walaupun saya sering dinas ke daerah, anak-anak saya masih SD saya tinggal tapi Alhamdulillah anak saya yang pertama bisa menjaga adik-adiknya. Jadi selama mamanya tugas, dan juga saya dapat tugas kuliah waktu itu beasiswa, itu memerlukan waktu yang sangat luar biasa ya, pagi kerja malam harus belajar mengerjakan tugas, anak-anak saya punya tanggung jawab masing-masing, kapan waktunya belajar dan sebagainya. Kalau suami saya bekerjanya swasta, kebetulan dia teknik di bidang listrik, namun sekarang sudah pensiun. Suami asli Madiun, Jawa Timur, kalau saya Jawa Barat, saya lahir di Jakarta, tapi keluarga besar saya ada di Bandung, dan punya kampung halaman juga di Subang. Anak pertama dan kedua saya perempuan, yang terakhir laki-laki, tiga anak saya. Alhamdulillah semuanya sudah kerja, dan yang bungsu malah udah married duluan.

*Apakah cita-cita ibu di masa kecil?*

Kalau saya dari kecil kalau saya dari kecil, pokoknya saya pengen kerja, bisa menghasilkan uang, bisa mandiri, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan orang tua. Jadi cita-cita saya hanya ingin kerja, alhamdulillah tercapai.

*Apakah hobi ibu untuk mengisi waktu luang?*

Kalau yang sifatnya santai, saya nonton, baca. Dulu mungkin saya masih punya waktu baca majalah, novel, tapi sekarang ya saya baca ker-jaan aja udah. Kalau yang sekarang sih ya ho-

binya saya lebih yang sifatnya santai ya, seperti makan, kuliner. Sama anak nomor satu tuh hobinya kuliner, hobinya makan cari makan.

*Hingga saat ini, ibu telah diberi kepercayaan oleh pimpinan sehingga dapat mendaki jenjang karir dari bawahi hingga saat ini, bagaimana cara ibu menyeimbangkan antara tugas ibu di kantor dengan tanggung jawab yang besar pula, dengan peran ibu sebagai istri dan juga seorang ibu?*

Saya tidak pernah membawa masalah kantor ke dalam keluarga. Artinya saya selalu memberikan kepercayaan sama anak-anak saya. Jadi dari mulai SD, anak-anak saya udah megang uang jajan satu bulan, silakan anda mau jajan, mau nabung, mau apa, mau pengen apa silakan. Jadi anak-anak saya udah terbiasa ingin apapun, anak itu berusaha dengan uang jajannya. Jadi anak saya selalu saya ajarkan usaha, waktunya belajar saya pasti akan ngajarin anak saya, jadi anak saya itu belajar di tangan saya sendiri, pelajaran dia saya selalu awasi, sampai dia juga mendapatkan ranking, alhamdulillah semua anak saya IO besar. Kalau ada satu hal yang baru pasti saya diskusi dengan anak-anak saya, sampai sekarang setiap ada masalah, saya selalu berdiskusi sama anak-anak saya, dan anak saya mendukung setiap mamanya kerja dalam kondisi apapun, sesibuk apapun. Dan saya nggak punya pembantu, jadi saya mengerjakan sendiri dan berbagi tugas. Anak saya tahu kalau sudah jam mamanya pulang, misalnya dia bermain sama teman-temannya pasti dia beresin. Jadi anak saya yang pertama, saya didik belajar memimpin untuk dirinya dan adik-adiknya. Alhamdulillah anak saya itu tiga-tiganya kompak sekali, jadi saya suka bilang gini, sampai mau menutup mata pun kalian harus saling mendukung, karena siapa lagi kalau nggak kita saling support di antara

Alhamdulillah anak saya itu tiga-tiganya kompak sekali, jadi saya suka bilang gini, sampai mau menutup mata pun kalian harus saling mendukung, karena siapa lagi kalau nggak kita saling support di antara keluarga. Saya membiasakan berdoa, ya Allah saya titipkan anak saya kepada-Mu, saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, saya niatkan saya bekerja karena Allah taala, dan untuk keluarga. Ya Allah lindungi anak-anak saya di manapun berada, jangan sampai anak saya terbawa dengan arus, sampai detik ini pun doa saya selalu begitu. Anak saya yang pertama saya juga sudah melihat, menilai dan bahkan juga dipercaya sama pimpinan kantornya, bahkan dipertahankan karena kejujurannya. Saya berusaha kejujuran, jujur itu nomor satu, kalau orang jujur pasti orang akan cari.

## *karir*

*Apa yang memotivasi ibu untuk terus bekerja hingga saat ini?*

Kalau motivasi saya bekerja, saya memang tipenya orang yang bertanggung jawab, yang tidak mau bergantung kepada orang lain. Walaupun suami sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan saya, tapi saya tidak mau bergantung terhadap orang lain, saya punya kemampuan dan saya tentunya izin kepada keluarga untuk terus bekerja. Tanggung-jawab sebagai ibu rumah tangga itu juga tidak lepas karena komitmen saya kalau saya bekerja untuk untuk apa. Pertama untuk diri saya sendiri, memayungi diri saya sendiri, karena kita tidak tahu umur di tangan Allah. Lalu saya akan mengayomi anak saya, artinya saya jika punya anak pasti dia akan saya usahakan lebih baik dari saya, dari sisi pendidikan, dari sisi pembinaan dan sebagainya. Itulah yang menjadi pegangan hidup saya sampai saat ini.



Dokumentasi : Inspektorat Jenderal Kemenkumham

*Saya punya prinsip yang sama dengan prinsip orang tua saya, kamu bekerjalah dengan jujur, itu yang selalu saya ingat. Jangan buruknya orang lain menjadi pandangan hidup, “oh dia begitu (buruk) tapi sama aja dapat penghasilannya.”. Karena orang tua saya juga kan PNS juga di Inspektorat dulunya, beliau berpesan, “kamu bekerja melihat orang baik, yang baik kamu ambil, kamu pelajari yang baiknya. Kalau yang buruknya tidak usah kamu jadi panutan, jangan jadi pembanding hidup kamu.”. Jadi itu yang saya pegang, janganlah kamu membawa rezeki yang tidak halal untuk keluarga kamu. Karena itu juga yang*



membentuk, suatu saat nanti anak-anak kamu kelak. Jadi saya bekerja dimanapun, alhamdulillah saya disayangi oleh atasan saya, itu juga menambah semangat saya untuk bekerja yang lebih baik karena itu amanah yang sangat luar biasa diberikan saya. Maka saya percaya kita bekerja ikhlas tidak usah pamrih, karena kalau hadiahnya dari Allah itu sangat luar biasa, dan itu saya dapatkan. Jadi saya bilang sama anak-anak saya kita harus berkjerja, berdampak, kepada organisasi, kepada masyarakat. Pola pikir saya dalam bekerja adalah selalu melakukan evaluasi, karena dengan evaluasi saya bisa melihat kekurangan, jadi kita bisa berkembang. Kalau kita baru sampai titik ini, kita harus sampai tujuan, ada langkah-langkah yang kita harus lakukan, dan saya dapatkan itu berdasarkan evaluasi ini.

*Menurut ibu, dari jabatan-jabatan yang pernah ibu emban, yang manakah yang paling menantang?*

Menurut saya, jabatan saya saat saya dipindahkan ke BSK, karena itu tusi yang berbeda dan saya harus belajar cepat, dan banyak kebijakan dan regulasi yang harus kita pahami. Sebetulnya di Itjen juga gak beda jauh ya. Semua ada tantangannya. Bagi saya, saya harus banyak membaca.

## pesan kepada ASN muda

*Adakah kiat-kiat yang bisa ibu bagi pada para ASN muda, khususnya perempuan-perempuan yang memiliki ambisi untuk menjadi seperti ibu, menjadi salah satu decision maker dalam instansi pemerintahan?*

Kita harus bisa punya tujuan hidup, sehingga kita sudah pasti dalam melangkah, dan kita mau berkjerja dengan baik. Kedua, harus jujur

dalam bekerja, apapun itu, selalu jujur. Misalnya seburuk apapun hasil evaluasi, saya lakukan sejujur mungkin. Lalu, selanjutnya harus terus mengembangkan kompetensi,

itu sudah pasti. *Janganlah jadi pimpinan yang hanya bisa menunjuk, janganlah jadi pimpinan yang hanya bisa menunjuk, tapi bagaimana pimpinan juga bisa ikut serta dalam membuat teamwork yang baik.*

## pengawasan berbasis digital

*Bagaimana pendapat ibu terkait pengawasan berbasis digital?*

Dengan adanya kebijakan, termasuk Permenpan juga, berkaitan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memang proses percepatan pelayanan publik itu menjadi outcome ya dari sebuah organisasi. Ke depannya program pengawasan tidak saja secara fisik, tapi memang harus dikuatkan bagaimana sistem IT nya. Apakah sistem IT tersebut telah mendukung dari sisi pengendalian dan juga pengamanannya, karena jangan sampai nanti terjadi proses

penyalahgunaan berbasis IT. *Jadi kalau kita tidak menguatkan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal, maka IT tersebut juga tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Kita tahun ini sudah mendiklatkan 25 auditor untuk dapat melakukan audit berbasis IT. Dan kita tentunya juga akan terus melakukan evaluasi atas apa-apa saja*



*pengawasan berbasis digital yang telah kita laksanakan, jadi kita juga bisa lebih baik dari hari ke hari.*

## *harapan bagi Itjen*

*Apa harapan ibu bagi Inspektorat Jenderal Kemenkumham ke depannya?*

Saya sangat berharap bahwa pada Inspektorat Jenderal dari dapat meningkatkan fungsi pengendalian artinya mulai perencanaan hingga akhir pertanggungjawaban sebuah kegiatan, khususnya yang sifatnya strategis ya, dan memang anggarannya besar, termasuk proses pengadaan dan sebagainya, nah ini Itjen perannya agar tidak ada temuan berulang.

Artinya *Itjen ke depannya harus menjadi pemberi solusi yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga Itjen menjadi role model.*

Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham







Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham

# LULUK

## Ratnaningtyas

Wawancara eksklusif bersama salah satu Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memberikan dedikasi dan meninggalkan legacy bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selama kurun waktu 9 Tahun.

Dialah, Luluk Ratnaningtyas, seorang pemimpin yang lahir di Jombang pada Tahun 1963 silam, akan membagikan cerita masa kecilnya, keluarga, karir, dan pandangannya terkait dengan transformasi pengawasan berbasis digital.

### masa kecil & keluarga

*Berbicara tentang keluarga ibu, bolehkah diceritakan background keluarga Ibu seperti apa mulai dari orang tua maupun saudara-saudara Ibu?*

Saya sendiri 8 bersaudara, saya nomor lima jadi empat kakak saya laki-laki, tiga adik saya perempuan. Background keluarga kami Bapak saya polisi dan ibu rumah tangga. Bapak saya asli dari Solo, kalau Ibu saya asli dari Jombang. Karena Bapak saya seorang polisi, beliau selalu sesuai harus sesuai aturan. Dan dari kecil, kami dibiasakan kita untuk membaca, lalu kita diskusi. Sampai kadang-kadang Ibu saya berkata ini anak sama Bapak sama saja ribut, padahal sebetulnya kita diskusi. Kita memang terbiasa diajarkan yang seperti itu, membaca, berdiskusi, ya akhirnya menjadi hobi membaca dan beda-beda pendapat satu dengan yang lain itu hal yang yang biasa. Dan kalau sekarang ini bicara tentang integritas, kami dari kecil sudah diajarkan orang tua seperti itu, memang orang tua selalu ngasih contoh.

*Lalu bagaimana dengan keluarga ibu, bolehkah diceritakan tentang suami dan putra/putrinya?*

Kalau suami saya bekerja di swasta, anak saya cuma satu perempuan, sudah bekerja di swasta. Dia sekolahnya jurusan komputer animasi, makanya pekerjaannya yang berkaitan dengan dunia desain, dan suaminya juga jurusannya hampir sama di broadcast. Jadi beda dengan saya kan sarjana hukum, lalu suami sarjana ekonomi, kalau anak saya apa ya istilahnya, ya sarjana seni lah.

*Apakah ibu memiliki hobi atau kegemaran di masa kecil?*

Kalau saya kecilnya itu malah lebih aktif menari, saya itu dulu ikut grup tari. kebetulan karena kita orang Jawa Timur, nari yang khusus Jawa Timur itu ngeremo, jadi misalnya ada tamu di kantor gubernur Jawa Timur, yang penari-penari dari Jombang ini oleh Pak Bupati dibawa.



## karir

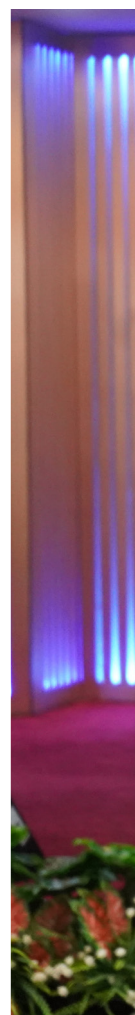
*Saat ini karir Ibu Luluk cukup gemilang, karena tidak banyak perempuan di Kementerian ini yang bisa meniti karir seperti Ibu. Apakah Ibu memiliki tips dan trik cara ibu membagi waktu antara tugas negara, dan juga menjadi ibu dan istri yang baik?*

Sebetulnya kalau bisa pada posisi sampai di sini, ya kita kerja sih ya mengalir mengalir saja ya, cuma saya punya prinsip ketika bekerja, saya harus jadi orang yang bermanfaat. Nah karena mungkin barangkali background awal, jadi bekal dari orang tua itu penting, orang tua selalu mengajarkan, ngajak diskusi, berarti sebelum diskusi kan pasti baca ya, begitu bekerja sebelumnya saya dosen, suka nggak suka saya mesti baca sebelum saya memberikan materi kepada mahasiswa saya. Masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, ternyata saya masuk di sudut PPNS, dan di sana juga memberikan materi pelajaran PPNS ke seluruh Kementerian. Kita harus memberikan materi misalnya hukum pidana, hukum acara pidana, kemudian berkaitan juga dengan bagaimana proses persyaratan penyidik bagi pegawai negeri sipil itu.

Nah pada saat kita memutuskan bekerja tadi, pasti harus komunikasi ke keluarga boleh nggak saya lanjut bekerja, ya diperbolehkan kita bekerja tetap tapi dengan catatan urusan rumah tangga tetap bisa diurus dengan baik. Cuma kendalanya ketika ibu-ibu bekerja, itu kan kendalanya ketika punya anak kecil sakit, atau kalau pas pembantu tiba-tiba pulang karena tinggal di Jakarta ini, kan saya tidak dengan orang tua ya, artinya kadang-kadang bingung mau nitip anak ke mana ya. Saya harus membagi

gimana caranya urusan rumah tangga selesai, urusan di kantor selesai. Meskipun dari awal suami saya sebetulnya tidak mengizinkan, tapi akhirnya setelah diskusi panjang lebar diizinkan tapi dengan beberapa catatan, dan alhamdulillah bisa kita penuhi semuanya.

*Saya punya prinsip gini setiap pekerjaan hari ini harus selesai hari ini, itu selalu seberapapun pekerjaan itu banyaknya, berarti saya harus membagi kapan saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kapan pekerjaan ini saya kerjakan. Sehingga ketika ritme itu sudah kita lakukan, kami akhirnya menjadi terbiasa bekerja seperti itu. kenapa saya lakukan seperti itu, karena bagi kami bekerja itu bagian dari ibadah, berarti kalau kita meninggal dalam keadaan kita bekerja, kita sedang beribadah.*



*Lalu sebelumnya Ibu sudah sempat cerita, sebelum di sini juga ada jabatan-jabatan lain yang pernah Ibu emban. menurut Ibu dari semua jabatan yang pernah Ibu emban, dari semua jabatan yang pernah Ibu emban?*

Menurut saya, semua pekerjaan itu menantang. Masing-masing punya tantangan, masing-masing punya kendala, masing-masing punya sesuatu yang harus kita perjuangkan.

Kalau Pak Menteri selalu sampaikan buat legacy, sesuatu yang bisa bermanfaat, artinya kita tanamkan pada diri kita, sepanjang kita sudah diberi amanah bekerja di satu tempat, kita harus lakukan itu. Untuk bisa mengetahui itu, kan pasti kita bicara dulu, ngobrol dengan banyak orang. Tanpa ngobrol dengan banyak orang, kita tidak akan pernah tahu kekurangannya apa. Jadi kalau ditanya tantangannya yang mana yang berat,

semuanya mempunyai tantangan masing-masing, kontribusi masing-masing, dan alhamdulillah support dari teman-teman, ketika saya bekerja dimanapun, anak buah saya atau pimpinan, semua mensupport baik. Alhamdulillah semua bisa berjalan baik, karena nggak mungkin saya kerja sendiri, pasti kerja sama dengan semua orang, dan luar biasa teman-teman mampu melaksanakan itu semuanya, sehingga bisa terwujud apa yang kita semua harapkan.



Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham



## wbk/wbbm

*Sebagai Koordinator Penyelenggaraan WBK/WBBM Kemenkumham, kendala apa saja yang pernah ibu hadapi dan bagaimana cara ibu menanggulangnya?*

Terkait WBK/WBBM ini sebetulnya ini program bagus sekali. Artinya program ini secara sadar tidak sadar memaksa unit kerja satuan kerja bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Semua sebetulnya sudah bekerja, tapi dengan adanya WBK/WBBM ini kan pasti ada standar. Di sana ada namanya lembar kerja evaluasi, ada item item yang harus dipenuhi. Nah apakah yang kita kerjakan selama ini, apakah yang kita kerjakan dari Januari sampai Desember sudah memenuhi atau tidak, sudah sesuai atau belum, baik itu bentuknya formatnya, cara pelaporannya, tindak lanjutnya. Nah seringkali ketika kita bekerja itu, sudah selesai dokumentasinya gak ada, laporannya gak ada, mungkin ada tapi antara satu satker dan satker lain jenisnya tidak sama, formatnya tidak sama. Nah dengan cara seperti ini, yang di ujung pelosok manapun, akan bekerja dengan cara yang sama. Meskipun hasilnya tidak sama, karena tantangan setiap satuan kerja kan beda. Ada satuan kerja yang memang kebetulan dikasih anggaran besar, kebetulan SDM-nya juga bagus, paham IT, tapi ada juga satuan kerja yang tidak memiliki itu, tapi tetap aja dituntut untuk bekerja bagus. Nah dengan barometer ukurannya dari WBK/WBBM ini standar yang minimal itu mereka sudah penuhi.



Dokumentasi:  
Kanwil Kemenkumham  
Jawa Timur



Dokumentasi :  
 Kanwil Kemenkumham  
 Jawa Timur

Cuman permasalahannya ketika WBK/WBBM itu sudah dibuat, mereka itu seolah-olah menginginkan semua harus lulus. Itu kendalanya ketika pada proses evaluasi, ketika teman-teman TPI menyampaikan misalnya tidak lulus, mereka banyak sekali protes. Sehingga mereka mereka yang tidak lulus-tidak lulus ini, melalui pimpinannya masing-masing diajukan kembali untuk dinilai kembali dan diluluskan. Saya beri contoh, setiap satuan kerja diminta membuat manajemen resiko, mitigasi resiko, resiko terkait layanan, resiko terkait integritas, apa yang kemudian dilakukan. Jadi sebetulnya ada sih kantor besar, tapi kan sebetulnya resikonya kecil, ketika dia selesai kan ya wajarlah selesai. Nah tapi ketika resiko besar, dia bisa bikin inovasi sesuatu yang luar biasa, sehingga masyarakat berdasarkan survei puas, maka itu yang penting. Jadi bukan hanya sekedar label WBK/WBBM, tapi ada yang kita mesti maknai.

Di 2023 ini pun, banyak pengajuan yang tidak lolos, minta diloloskan, sementara kami sudah bekerja sesuai dengan kriteria. Makanya supaya sama-sama bekerja, cara penilaiannya pun kemarin dilakukan secara berjenjang. Jadi kalau satker, yang menilai kantor wilayah. Kalau kantor wilayah, yang menilai unit Eselon I. Untuk Eselon I mengusulkan sendiri, dan disampaikan ke kita, dan kita pun melakukan penilaian. Setelah penilaian di kita pun juga dilakukan panel. Awal dulu kan dibebankan kepada inspektorat, dikirim aja semuanya, setelah dibuka banyak itu aplikasi atau dokumen data dukung itu zonk, kosong gitu loh. Artinya kita tidak memberikan pembelajaran bagus buat mereka. Kan itu mereka hanya ingin kontes dapat juara gitu, padahal sebetulnya bukan itu yang diharapkan. Intinya ini program bagus, ini kita mulai membenahi semua satu-persatu, kalau juara-juaraan itu kan hanya memberikan motivasi, cuman kadang-kadang kebablasan yang semangat juara-juaraan tadi.



## *pengawasan berbasis digital*

*Sesuai dengan tema majalah tahun ini yaitu Menuju Pengawasan Berbasis Digital, bagaimana pendapat ibu terkait pengawasan berbasis digital di lingkungan Itjen Kemenkumham?*

Tentu saja kami sangat mendukung ya untuk itu. Kami di Inspektorat Wilayah VI, sebelumnya juga di V, IV sepanjang saya Inspektornya saya sudah tidak gunakan lagi diskusi manual, mengerjakan pekerjaan dengan di print itu sudah tidak ada lagi. Mengingat besarnya kekuatan teknologi, sekarang ini kan semua gayanya dengan menggunakan digital, suka tidak suka kita pun harus lakukan itu. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan pun makin ke depan juga akan dilakukan seperti itu. Nah harapan kami bagi APIP Itjen Kementerian Hukum dan HAM di dalam fase transformasi menuju pengawasan berbasis digital. Ini akan menjadi isu strategis ya, mengingat perkembangannya melahirkan resiko-resiko baru yang harus kita tindaklanjuti. Karena pasti berbeda ketika melakukan audit dengan sistem yang manual, berbeda dengan menggunakan digital. Hal-hal ini bisa kita lakukan untuk percepatan, menghemat anggaran, waktu, dan sebagainya. Kemudian juga kami harapkan nanti APIP Itjen Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjamin mutu dapat memberikan advice. Selain itu, APIP juga harus punya kompetensi menganalisis bukti-bukti elektronik sehingga tidak memberi peluang ditolakny hasil pengawasan di pengadilan.

Dokumentasi :  
Inspektorat Jenderal  
Kemenkumham







## *pesan kepada ASN muda*

*Pesan untuk para ASN/PNS muda Kemendikbud sebagai abdi negara?*

Ketika kita menjadi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Inspektorat Jenderal ini, khususnya lagi yang muda-muda ya, untuk masuk menjadi pegawai telah melalui proses yang panjang, dan tidak mudah, seleksinya juga berat, artinya mereka sudah terpilih itu berarti yang terbaik. Tentu ketika mereka sudah terpilih yang terbaik, sudah ditugaskan di tempat masing-masing.

*Pesan yang pertama tentu pelajari ketika bekerja di tempat tersebut, aturan-aturannya, dasar hukumnya, pelajarilah semua peraturan untuk pekerjaan kita, dengan kita mempelajari banyak peraturan tadi, kita nanti bisa bekerja lebih mudah. Peraturan-peraturan tersebutlah yang menjadi dasar kita bekerja, menjadi referensi kita bekerja. Ketika itu sudah dikuasai akan lebih mudah melaksanakan tugas, mudah juga menyelesaikan permasalahan yang manakala muncul dan juga lebih mudah kita melakukan inovasi. Setelah itu baru kita bisa bekerja lebih baik, memberikan kontribusi yang baik.*



# PROGRAM 2024 UNGGULAN

## 1

### **Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (GERBANG TRANSISI) Tahap-2 untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Merupakan kegiatan berkelanjutan dari Program Unggulan Tahun 2023 yang diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan sarana virtual.

## 2

### **Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi (IRJEN ADA)**

Merupakan program unggulan Inspektur Jenderal yang diperuntukkan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjangkau aspirasi dan informasi untuk peningkatan kinerja.

## 3

### **Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi Tahap-2**

Merupakan kegiatan berkelanjutan dari Program Unggulan Tahun 2023, dilaksanakan oleh para Inspektur Wilayah ke Satuan Kerja diutamakan ke Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikankonsultasi ke satuan kerja. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dalam setiap bulan.

## 4

### **Aktif Belajar Kolaboratif**

Kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui kerja sama secara sinergis dengan program GIA Corpu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mitra kerja lainnya.

## 5

### **Sertifikasi API, PELOPOR, dan CRMO**

**API (Ahli Pembangun Integritas)** bagi Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi personil bersertifikasi kompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi unit kerjanya dan sebagai pilot project yang akan dilanjutkan sebagai dasar pembentukan Duta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**PELOPOR (Penyuluh Anti Korupsi)** adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Anti Korupsi yang ditujukan untuk Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Tinggi dan pegawai Inspektorat Jenderal selain Auditor serta para pegawai pada Satuan Kerja yang mempunyai kompetensi integritas sebagai agen perubahan dan sebagai pilot project dan akan dilanjutkan sebagai dasar pembentukan Duta Integritas dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**CRMO (Certified Risk Manajement Officer)** adalah Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (Integrated Risk Management Analyst) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukkan bagi jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.

**Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** untuk jabatan strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki kompetensi yang memadai dalam proses pengadaan barang/jasa.

**Pelatihan Digital Forensic dan Data Analytic** yang memungkinkan bagi APIP untuk memaksimalkan nilai aset data untuk kepentingan pembuatan keputusan pimpinan melalui alat visualisasi dan pelaporan serta meningkatkan pemahaman terkait indikasi fraud melalui proses data analytics.



### **Joint Audit Layanan Pemasarakatan**

Audit bersama dengan Stakeholder pengawasan lain untuk menghasilkan satu laporan audit yang lebih akuntabel, khususnya pada bidang Pemasarakatan.



Bagaimana melaporkan pengaduan  
di lingkungan Kemenkumham ?

Type something...

### Layanan Saluran Pengaduan :



[www.wbs.kemenkumham.go.id](http://www.wbs.kemenkumham.go.id)  
[www.itjen.kemenkumham.go.id](http://www.itjen.kemenkumham.go.id)  
[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)



[itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)  
[pengaduan.itjen@kemenkumham.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkumham.go.id)



Telp dan Fax (021-5252975)



SMS Gateway (08111377803)



Surat Pos  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.  
X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta  
Selatan 12940



[facebook.com/ItjenKumham/](https://facebook.com/ItjenKumham/)  
[instagram.com/humasitjenkumham/](https://instagram.com/humasitjenkumham/)  
[twitter.com/itjenkumham](https://twitter.com/itjenkumham)

